



Kementan Klaim HPP Pupuk Sesuai Audit BPK

KEMENTERIAN Pertanian membantah penetapan harga pokok pembelian (HPP) pupuk hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan besar seperti indikasi yang disebut BPK. Bahkan, HPP pupuk baru akan ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari hasil audit BPK.

Direktur Pupuk dan Pestisida Ditjen Sarana dan Prasarana Kementerian Pertanian Muhrizal Sarwani mengatakan pola penetapan HPP pupuk seperti itu telah dilakukan sejak tahun lalu. "BPK melakukan audit dan keluarlah HPP. Itu yang kita

gunakan untuk membayar subsidi," ujar Muhrizal melalui sambungan telepon, kemarin.

Muhrizal menanggapi ketarangan BPK ketika menyampaikan hasil audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2013 kepada DPR, di Jakarta, Selasa (10/6).

Selain menyebutkan indikasi HPP pupuk menguntungkan

kan perusahaan besar, BPK menyatakan petani justru dirugikan karena seringkali harus membeli dengan harga lebih tinggi daripada harga eceran tertinggi (HET) yang ditentukan pemerintah.

Ketua BPK Rizal Djaili mengatakan pada tahun anggaran 2013, penetapan nilai subsidi pupuk melebihi seharusnya hingga Rp498,44 miliar.

Pada tahun yang sama, pemerintah kurang bayar subsidi pupuk Rp6,63 triliun.

Adapun Muhrizal mengatakan hasil audit BPK tidak jauh berbeda dengan hasil audit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Kita tidak berani menggunakan perhitungan di luar audit yang dikeluarkan dari situ."

Lebih lanjut, terkait indikasi petani yang membeli pupuk lebih tinggi daripada HET, Muhrizal mengungkapkan, ada dua kemungkinan yang terjadi. Pertama, pupuk yang keluar dari lini tiga atau dari kios kemudian dijual dengan harga yang lebih tinggi kepada petani karena jumlahnya tidak memadai.

"Kedua, bisa jadi kiosnya ada di satu desa, biasanya diangkut ke tempat ramai dan minta tambahan ongkos angkut. Namun, HET umumnya tetap, untuk urea misalnya Rp1.800 di kios," pungkasnya. (Wib/E-1)